

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada masa pemerintahan Orde Baru, keberadaan etnis Tionghoa merupakan masalah yang krusial dalam tatanan pemerintahan Soeharto. Masalah tersebut begitu kompleks bukan saja mengenai identitas kebangsaannya, tetapi juga masalah politik, pendidikan, ekonomi dan kebudayaannya yang berkembang di Indonesia. Citra Etnis Tionghoa akhirnya dinilai memiliki pandangan yang negatif dikalangan pemerintahan Soeharto yang terlihat dalam kebijakan-kebijakannya.

Percobaan kudeta pada tanggal 30 September 1965 adalah suatu peristiwa yang memakan banyak korban jiwa secara cepat. Hal ini diduga didalangi oleh Partai Komunis Indonesia yang menjadikan keamana Negara tidak stabil. Keluarnya mandat presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966 (supersemar) kepada Soeharto dalam upaya memulihkan kestabilan dan keamanan Negara Indonesia dari pengaruh Partai Komunis Indonesia adalah awal berakhirnya Orde Lama . Yang pada tahun 1967 Soeharto resmi diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia ke dua yang menjadi awal pemerintahan Orde Baru.

Orde Baru (1966-1998) merupakan “zaman gelap” budaya Tionghoa karena semua budaya Tionghoa – organisasi Tionghoa, Sekolah berbahasa pengantar

Mandarin, dan media Tionghoa dilarang oleh pemerintahan Orde Baru (Z.H Li dalam You Hoon 2012 : 141) Tahun 1967. Instruksi Presiden (Inpres) no. 14 tahun 1967 melarang segala sesuatu yang berbau Cina di Indonesia baik itu dari agamanya, pendidikan, kepercayaan, seni, kebudayaan maupun sastra. Keluarnya Inpres ini menjadikan Sentiment anti cina di berbagai daerah banyak etnis Tionghoa dibunuh tanpa diadili bahkan rumah-rumah dan toko- toko mereka dijarah dan di bakar (Liem 2000 : Pengantar).

Sentiment anti Cina di Indonesia dikarenakan Cina adalah sebuah Negara komunis yang sejak didirikan pada tahun 1946 telah dipimpin oleh Partai Komunis Cina (PKC). Meletusnya kudeta pembantaian masal 1965 di Indonesia yang pada masa ORBA didalangi oleh partai komunis yang hal ini menjadikan masyarakat Indonesia berpandangan bahwa setiap etnis Tionghoa yang ada di Indonesia adalah penganut paham komunis yang menjadikan keberadaan mereka tidak aman meskipun sebenarnya tidak semua etnis Tionghoa di Indonesia menganut paham tersebut tetapi mereka terkena dampaknya mereka sering diberlakukan dengan kasar dan rumah mereka dijarah. Untuk menghindari dari tekanan, banyak dari mereka yang mengadopsi nama yang bernuansa Indonesia. Namun pergantian nama tersebut tidak secara keseluruhan agar tidak menghilangkan identitas. Contohnya nama “Han” menjadi nama Jawa “Handoko” atau “Handoyo”.(ibid, : 3)

Desa Sunggal adalah desa yang terletak sekitar 8 km dari kota medan yang dihuni oleh beberapa suku. Ada Melayu, Jawa, Batak, Tamil, Karo, dan Tionghoa. Etnis

Tionghoa di desa Sunggal ini juga sangat heterogen. Diantaranya ada suku *Hikkien*, *Teochiu*, *Khe (Hakka)*, *Canton (Kong Hu)* dan *Liok Hong*. Masing-masing suku ini mempunyai perkumpulan sosial dengan pekerjaan yang berbeda-beda.

Suku Hokkien umumnya adalah pedagang yang banyak berdomisili di kawasan perdagangan. Sedangkan suku Teochi bekerja dibidang pertanian mereka sering disebut ‘cina kebun sayur ‘ yang pada akhirnya banyak dari mereka beralih menjadi pedagang. Di Sunggal, suku Teochi dan Liok Hong adalah suku yang dominan. Suku Canton umumnya berprofesi sebagai pedagang emas dan ahli pertukangan. Suku Khe bergerak dibidang bisnis obat-obatan dan perdagangan. Sedangkan masyarakat Tionghoa dari suku Hainam banyak berbisnis dalam bidang makana (Anto 2009 : 5)

Perbedaan profesi dan suku, sering menjadi pemicu terjadinya pelapisan sosial dan konflik antar mereka karena sering saling mengejek. Pada peristiwa kekerasan tahun 1966, banyak etnis Tionghoa kebun sayur di Desa Sunggal menjadi korban kekerasan. Rumah mereka yang terpencar-pencar menjadi sasaran empuk masa. Pada tahun 1960-an banyak etnis Tionghoa di Desa sunggal yang tergiur dengan janji-janji akan memperoleh tanah sehingga mereka ikut tergabung dalam organisasi Partai Komunis Indonesia. Tapi dalam situasi rusuh, masa sering kali tidak bisa membedakan mana warga Tionghoa yang pro komunis atau nasionalis.

Tahun 1974 pemerintah membuat kebijakan menghapus semua sekolah-sekolah Tionghoa swasta yang mengakibatkan keberadaan siswa/i etnis Tionghoa di desa

Sunggal terancam putus sekolah atau harus pindah ke sekolah pembauran. (ibid, : 6 : 25). Krisis Moneter 1997 yang melanda Indonesia juga berdampak bagi etnis Tionghoa di Sunggal dimana Ruko dan rumah milik mereka banyak yang dirusak karena dianggap merekalah (etnis Tionghoa) penyebab terjadinya krisis moneter. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Keberadaan Etnis Tionghoa Masa Orde Baru Di Desa Sunggal Medan ”**.

1.1. Identifikasi Masalah

Dalam setiap penelitian, permasalahan merupakan hal yang paling utama dan diiringi bagaimana cara pemecahannya. Namun sebelum hal itu dilakukan kita harus melakukan identifikasi masalah terlebih dahulu.

Agar penelitian ini menjadi terarah dan jelas maka perlu dirumuskan identifikasi masalah yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah dapat di identifikasikan sebagai berikut :

1. Keberadaan etnis Tionghoa di bidang pemukiman pada masa Orde Baru di desa Sunggal
2. Kebijakan pemerintah Orde Baru tentang Kebijakan Pokok Penyelesaian Masalah Cina pada tahun 1967 pada etnis Tionghoa di desa Sunggal
3. Kebijakan Ekonomi dan pendidikan pemerintah Orde Baru pada tahun 1970-an, pada etnis Tionghoa di desa Sunggal

4. Krisis Moneter 1997 pada etnis Tionghoa di desa Sunggal
5. Mata Pencaharian etnis Tionghoa pada masa Orde Baru di desa Sunggal

1.3. Pembatasan Masalah

Dalam hal ini penulis membatasi permasalahan karena mengingat luas dan panjangnya kurun waktu masalah dalam penelitian ini. Analisis masalah juga membatasi masalah ruang lingkup masalah. Disamping itu masih perlu dinyatakan secara khusus batas-batas masalah agar peneliti lebih terarah, maka untuk mempermudah penelitian ini penulis membatasi masalah hanya mengkaji dibidang Pemukiman, Mata pencaharian dan Pendidikan etnis Tionghoa. Dan untuk membatasi kurun waktu masalah peneliti membagi kurun waktu Orde Baru menjadi empat bagian yaitu pada tahun 1960-an, 1970-an dan 1980-an dan 1990-an. Dari penjelasan pembatasan masalah maka peneliti menyimpulkan batasan masalah sebagai berikut **“Keberadaan Etnis Tionghoa Masa Orde Baru Di Desa Sunggal Medan”**.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah kedatangan etnis Tionghoa ke Sunggal ?

2. Bagaimana interaksi sosial masyarakat pribumi dengan etnis Tionghoa masa Orde Baru di Desa Sunggal?
3. Bagaimana keberadaan etnis Tionghoa dibidang pemukiman, mata pencaharian dan pendidikan pada masa Orde Baru di Sunggal ?

1.5. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejarah kedatangan etnis Tionghoa ke desa Sunggal Medan.
2. Untuk mengetahui interaksi sosial masyarakat Pribumi dengan etnis Tionghoa pada masa Orde Baru
3. Untuk mengetahui gambaran pemukiman, pekerjaan dan pendidikan etnis Tionghoa di Desa Sunggal pada masa Orde Baru

1.6. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian diatas, maka diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman penulis dalam meningkatkan pemahaman tentang keberadaan etnis Tionghoa pada masa Orde Baru
2. Sebagai perbandingan kepada peneliti lain yang ingin meneliti masalah-masalah yang sama dengan tempat dan waktu yang berbeda.
3. Sebagai sarana informasi dan sumbangan yang bermanfaat bagi masyarakat di desa Sunggal
4. Sebagai refrensi pembelajaran



UNIVERSITAS NEGERI
MEDAN
UNIMED

THE
Character Building
UNIVERSITY